

## COMMUNITY PARTICIPATION IN REALIZING CITY WORTH CHILDREN IN SURAKARTA CITY

[Anjaniwulanndari@yahoo.com](mailto:Anjaniwulanndari@yahoo.com)

(Anjani Wulanndari)

[ahmadtaufiqimron@gmail.com](mailto:ahmadtaufiqimron@gmail.com)

(Drs. Ahmad Taufiq, M.Si)

Departement of Politics and Government, Faculty of Social and Political Sciences,  
Diponegoro University

Jl. Prof. H. Soedarto, SH, Tembalang, Semarang, Poctal code: 1269

Website: <http://www.fisip.undip.ac.id> email: [fisip@undip.ac.id](mailto:fisip@undip.ac.id)

### Abstract

Attempt to realize a child friendly city need community participation in participating in every policy that protects children's rights, community participation is very important to know what they need to improve children's welfare and development. Communities are given space to participate and channel ideas and aspirations in child worthy programs. In this regard, the Surakarta city government asked the community to participate in achieving success and care about the children's issues needed by the children of Surakarta City in Realizing a Child Friendly City. this is focused on communities that have child care such as non-governmental organizations and children's forums.

This study aims to explain how the process of participation and forms of community participation and obstacles encountered in the implementation of child-friendly city policies in Surakarta City. What forms of participation are carried out by the community. The researcher also wanted to find out how the process of community institutions that have concern for children and the Surakarta children's forum was able to get an award. The research method used is descriptive qualitative. The technique of collecting data is done by interviews, documentation and literature. Data validity and reliability were tested using the data source Triangulation technique.

The results of these studies are that community participation is realized because of the high public awareness of children's rights that must be fulfilled. The enormous enthusiasm of the community successfully delivered the city of Surakarta to the highest award. The form of community participation is in the form of energy,

mind and material. Communities work with movers from the formal and non-formal sectors. From the non-formal sector there are Non Governmental Organizations, the Business World together with the Surakarta Children's Forum always support and invite the public to be involved in supporting government policies. From the government itself, it always provides an open space for participation to convey the aspirations of the community. The challenge faced by the city of Surakarta in realizing a city worthy of children is the still high egosectoral inter DPOs in Child-Friendly Cities and the unavailability of a child data information system in Surakarta.

*Keywords: Community Participation, Child Friendly City*

## **A. PENDAHULUAN**

Anak merupakan generasi penerus bangsa yang perlu mendapat perhatian khusus oleh pemerintah dan masyarakat karena masa depan bangsa berada ditangan anak-anak tersebut dan yang dimaksud dengan anak-anak adalah mereka yang belum berusia 18 tahun.<sup>1</sup> Banyak kasus kekerasan dan tindak kriminalitas masih terjadi pada anak yang sangat memprihatinkan dan berdampak negative pada masa depannya. Pemerintah terus mengembangkan kebijakan dalam hal perlindungan anak. Program-program pemerintah untuk memenuhi hak dan dan kebutuhan anak salah satunya adalah Kebijakan Kota Layak Anak yang merupakan kota dimana didalam kota tersebut anak-anak dilindungi dan mendapatkan haknya sebagai anak dalam mencapai suatu pembangunan kota yang berkelanjutan.

Pentingnya integrasi antara pemeintah dan masyarakat tidak bisa lagi terhindarkan. Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak yang diinisiasi oleh kabupaten/kota yang berusaha mengaplikasikan sistem pembangunan berbasis hak anak. Kebijakan ini dilakukan melalui pengintegrasian komitmen dan sumberdaya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak.<sup>2</sup>

Untuk mendukung keberhasilan Kota Layak Anak, tentu saja pemerintah tidak bisa berdiri sendiri, diperlukan kerjasama dengan masyarakat. Dalam hal ini, penting sekali menekankan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Kebijakan Kota Layak Anak (KLA). Dengan demikian, penting sekali menekankan partisipasi masyarakat dalam Kebijakan Kota Layak Anak.

---

<sup>1</sup> Undang-Undang Republik Indonesia No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 Ayat 2

<sup>2</sup> <http://www.kemenpppa.go.id/lib/uploads/list/8d214-renstra-kpppa-2015-2019.pdf> Diakses Pada Hari Sabtu, Tanggal 21 September 2017, Pukul 21:05 WIB.

Keberhasilan kebijakan tersebut tidak lepas dari dukungan dan terlibatnya masyarakat.

Partisipasi masyarakat sangat penting untuk mengetahui apa yang mereka butuhkan untuk meningkatkan kesejahteraan dan perkembangan anak. Tinggi rendahnya partisipasi masyarakat dapat dinilai dari seberapa besarnya ruang partisipasi yang disediakan untuk mereka berperan dan memberikan ide maupun solusi yang masyarakat butuhkan. Penelitian ini mengacu pada konsep masyarakat luas dan kompleks dengan tujuan untuk mempermudah dalam memetakan awal dari kebijakan dan bentuk partisipasi masyarakat dalam mewujudkan kebijakan Kota Layak Anak di Kota Surakarta. Pembahasan ini difokuskan pada partisipasi masyarakat yang memiliki kepedulian terhadap anak yang ditunjukkan dengan adanya Lembaga yang peduli terhadap anak dan Forum Anak Surakarta. Dalam keberhasilan implementasi kebijakan Kota Layak Anak di Surakarta partisipasi masyarakat dan pemerintah yang peduli terhadap isu anak sangat dibutuhkan agar Kota Surakarta mendapatkan prestasi Kota Layak Anak terbaik Se-Indonesia.

## **B. METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data yaitu wawancara dan dokumen. Penelitian ini dihasilkan dari wawancara yang dilakukan peneliti kepada beberapa informan yang terdiri dari Kepala Bidang Perlindungan Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Surakarta, Staf dari Unit Pelayanan Terpadu Dinas PP PA PM Kota Surakarta, Direktur Yayasan KAKAK, dan Forum Anak Kota Surakarta

### **Konsep Anak Sebagai Warga Negara**

Sebagai warga negara anak memiliki hak-hak yang akan melekat terus menerus pada diri anak tersebut seperti hak akan kesehatan, pendidikan, keamanan, perlindungan dan kesejahteraannya dalam pengupayaan kesejahteraan ini tidak hanya dibebankan kepada orang tua semata, tetapi juga oleh lingkungan tempat si anak tumbuh dan berkembang serta pemerintah sebagai penanggungjawab kesejahteraan generasi penerus bangsa dan sebagai warga negara.

### **Konsep Kebijakan Kota Layak Anak**

Kota Layak Anak adalah Kota yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat, dunia usaha dan media masa yang terencana secara menyeluruh

dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak dan perlindungan anak.<sup>3</sup>

### **Teori Partisipasi Masyarakat**

Partisipasi adalah pelibatan seseorang atau beberapa orang dalam suatu kegiatan. Keterlibatan dapat berupa keterlibatan mental dan emosi serta fisik dalam menggunakan segala kemampuan yang dimilikinya (berinisiatif) dalam segala kegiatan yang dilaksanakan serta mendukung pencapaian tujuan dan tanggung jawab atas segala keterlibatan. (Dwiningrum, Siti Irene Astuti. 2011)

## **C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **1. Tahapan Partisipasi Masyarakat dalam Mewujudkan Kota Layak Anak di Kota Surakarta**

Kota Layak Anak adalah kota yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha, yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak dan perlindungan anak. Pengembangan Kota Layak Anak dimulai dari kabupaten/kota, kabupaten/kota dikatakan Kota Layak Anak apabila seluruh kecamatan di kabupaten/kota tersebut layak anak, kecamatan dapat dikatakan layak anak apabila seluruh kelurahan sudah layak anak dan seluruh RT/RW dan keluarga yang layak anak.

Partisipasi masyarakat menjadi hal yang sangat penting untuk mengetahui apa yang sangat penting untuk mengetahui apa yang dibutuhkan mereka untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tingginya partisipasi masyarakat tersebut dikarenakan tingginya ruang partisipasi untuk mengeluarkan ide-ide ataupun solusi atau kondisi yang ada di masyarakat yang sesuai dengan kebutuhan.

Menurut Oakley (1991:9) indikator yang dapat menentukan partisipasi masyarakat adalah adanya kontribusi, adanya pengorganisasian, peran masyarakat dan aksi masyarakat, dan motivasi masyarakat serta tanggung jawab masyarakat. Dimensi Kontribusi Masyarakat dijabarkan menjadi indikator-indikator : a. Kontribusi Pemikiran, b. Kontribusi Dana, c. Kontribusi Tenaga, dan d. Kontribusi Sarana.

Partisipasi masyarakat Kota Surakarta dalam mewujudkan keberhasilan kebijakan Kota Layak Anak sudah tinggi. Kesadaran masyarakat dan kepedulian terhadap anak membuat mereka peduli dan ikut

---

<sup>3</sup> <https://www.kemennppa.go.id/index.php/page/read/92/1234/k-l-a-kabupaten-kota-layakanak>  
Diakses Pada Hari Minggu, Tanggal 22 September 2017, Pukul 20:15 WIB

terlibat dalam program-program yang dilakukan oleh pemerintah untuk memenuhi hak-hak anak atau kebijakan yang ramah anak. Mereka sadar bahwa anak-anak di Kota Surakarta perlu akan adanya kebijakan yang pro anak dan ramah anak agar hak-hak anak didapatkan. Partisipasi masyarakat ini ada karena pemerintah melibatkan masyarakat untuk ikut berpartisipasi mendukung kebijakan KLA yang dibuat oleh pemerintah Kota Surakarta.

Ada aktor yang mempengaruhi masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam mendukung kebijakan KLA di Surakarta, banyak pihak yang mencakup Pemerintah Daerah sebagai fasilitator dari swasta, perguruan tinggi, masyarakat, ada juga pihak kepolisian, kementerian agama, Rutan, LSM dan Organisasi kemasyarakatan. Walikota Surakarta merupakan aktor yang sangat penting untuk mendorong masyarakat agar berpartisipasi, beliau selalu menyampaikan kaitannya dengan KLA pada saat Sonjo Wargo atau berkeliling ke masyarakat sekitar kecamatan kelurahan dengan selalu mengajak masyarakat untuk berpartisipasi agar Kota Surakarta menjadi Kota yang ramah anak. Selain walikota Gugus Tugas KLA sendiri juga sangat berperan dalam mendukung partisipasi masyarakat, baik dari Dinas Terkait, Lembaga Masyarakat, Forum Anak dan lain sebagainya.

Pencapaian program-program pendukung Kota Layak Anak di Kota Surakarta yang dilakukan dengan prinsip Non-diskriminasi, kepentingan terbaik untuk anak, setiap anak mempunyai hak hidup, kelangsungan hidup, dan berkembang maksimal, mendengar dan menghormati pandangan anak. Capaian tersebut adalah Puskesmas Ramah Anak, Sekolah Ramah Anak, Kartu Insentif Anak (KIA), Cakupan Pemberian Akta Kelahiran Anak Tinggi, Bidang Transportasi, Taman Cerdas, Radio Anak KONATA, Forum Anak, Pojok Asi dan Gerakan Wajib Jam Belajar (GWJB).

Keberhasilan suatu program yang ada di masyarakat pasti didukung oleh tingginya partisipasi masyarakat, partisipasi masyarakat menjadi hak yang sangat penting untuk mengetahui apa yang dibutuhkan mereka untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tingginya partisipasi masyarakat tersebut dikarenakan tingginya ruang partisipasi untuk mengeluarkan ide-ide ataupun solusi atau kondisi yang ada dimasyarakat yang sesuai dengan kebutuhan. Keterlibatan masyarakat dapat berbentuk pemberdayaan keluarga/masyarakat sekitar, program bersama, penyediaan layanan tubuh kembang dan perlindungan anak, dan peyediaan dana.

## **2. Bentuk Partisipasi Masyarakat dalam Mewujudkan Kota Layak Anak di Kota Surakarta**

Partisipasi masyarakat merupakan sesuatu yang penting dilakukan karena masyarakat secara langsung bersentuhan dengan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam penyelenggaraan kebijakan. Ada dua cara keterlibatan dalam partisipasi, yakni partisipasi langsung maupun tidak langsung. Masyarakat Kota Surakarta ada yang berpartisipasi langsung dan tidak langsung dalam mewujudkan kebijakan Kota Layak Anak.

Dilihat dari dimensi Kontribusi Masyarakat yang berbentuk Kontribusi Pemikiran, Kontribusi Dana, Kontribusi Tenaga, dan Kontribusi Sarana. Masyarakat Kota Surakarta dalam berpartisipasi dalam bentuk Pemikiran, Dana, Tenaga dan Sarana. Dalam mewujudkan kebijakan Kota Layak Anak Partisipasi masyarakat memang dibutuhkan. Masyarakat dan anak sendiri menjadi objek partisipasi bukan hanya warga masyarakat yang menjadi sasaran program kebijakan, akan tetapi lembaga masyarakat seperti PKK, tokoh masyarakat, yayasan yang peduli dengan anak di Kota Surakarta.

Bentuk partisipasi masyarakat Kota Surakarta dalam mewujudkan Kebijakan Kota Layak Anak ada yang berupa dana atau materiil, dalam mendukung kebijakan tersebut yang diberikan oleh masyarakat dana swadaya untuk melancarkan dan mensukseskan kegiatan dalam kebijakan tersebut. Pemerintah hanya saja meminta masyarakat agar berpartisipasi dalam setiap kegiatan, akan tetapi mereka sangat antusias dan berinisiatif untuk mengumpulkan dana dalam melaksanakan kegiatan yang berhubungan dengan kegiatan anak. Saat Hari Anak Nasional (HAN), Perkumpulan Masyarakat Surakarta (PMS) memberikan 8000 Dus Makanan dan pemasangan 4 baliho besar, ada juga sumbangan doorprice dari masyarakat untuk anak yang mengikuti kegiatan HAN. Tidak hanya dari masyarakat saja dari bank dan perusahaan yang ada di Kota Surakarta memberikan bingkisan untuk anak-anak yang hadir dan penampil dalam Pelaksanaan Hari Anak Nasional (HAN).

Selain partisipasi yang berbentuk dana atau materiil, masyarakat Kota Surakarta membantu secara sukarela dalam bentuk tenaga dengan ikut langsung dalam program-program yang digagas oleh pemerintah untuk menciptakan lingkungan yang ramah anak dan layak anak. Di Kota Surakarta mempunyai Program Gerakan Wajib Jam Belajar (GWJB), Secara sukarela masyarakat membuat semacam satgas yang mengawasi pelaksanaan GWJB tingkat RW, mereka berkeliling kampung sambil melakukan sosialisasi, mengarahkan anakanak yang masih berada diluar

rumah untuk belajar dan menyarankan orang tua untuk mematikan TV agar tidak mengganggu konsentrasi anak dalam belajar. Satgas tersebut memperingatkan dengan memberi tanda sirene dan juga lewat masjid sebagai peringatan belajar pada jam yang sudah ditentukan. Masyarakat memberikan respon positif dengan program belajar yang ada di lingkungan masyarakat agar anak-anak mau belajar pada jam-jam yang sudah disepakati oleh masyarakat.

### **3. Tantangan Partisipasi Masyarakat dalam Mewujudkan Kota Layak Anak Di Kota Surakarta**

#### **1. Rendahnya Komitmen**

Dalam memenuhi hak-hak anak sudah dibentuk Gugus Tugas seperti yang ada dalam Surat Keputusan Walikota Surakarta No 130.05/68F/1/2011 tentang Pembentukan Gugus Tugas Pengembangan KLA yang digunakan sebagai acuan untuk melaksanakan tugas masing-masing dalam mengembangkan Surakarta sebagai Kota Layak Anak. Keberhasilan Kota Surakarta dalam mendapatkan Gelar Kota Layak Anak pasti dengan dukungan dari SKPD dan masyarakat yang sangat bagus.

Dalam pelaksanaan kebijakan KLA SKPD melakukan koordinasi antara satu dengan yang lain. Akan tetapi masih ada permasalahan yang muncul. Bagi beberapa SKPD masih berfikir bahwa program atau kebijakan Kota Layak Anak ini adalah sepenuhnya menjadi urusan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, tidak menjadi urusan bersama. Sehingga ini memunculkan pemikiran-pemikiran egosektoral yang tinggi antar OPD di dalam penyelenggaraan KLA.

Dilihat dari pandangan sebagai anggota Gugus Tugas KLA Kota Surakarta yang didalamnya juga ada OPD yang ikut Tim Gugus Tugas masih ada komitmen yang rendah dalam pelaksanaan KLA untuk memberikan hak-hak anak sepenuhnya. Dalam melaksanakan program dan mengalokasikan dana untuk anak masih sedikit lemah, mereka juga masih mementingkan egosektoral karena merasa itu bukan ranah mereka dalam melaksanakan kegiatan. Ini yang membuat berbagai OPD KLA saling melempar tanggungjawab untuk menjalankan program kebijakan dan membuat inovasi baru dalam memenuhi hak-hak anak.

#### **2. Belum Tersedianya Sistem Informasi terkait dengan Data Anak**

Kekurangan Sumber Daya Manusia yang ada didalam Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Surakarta khususnya dibidang Perlindungan Anak

dan banyaknya program yang harus dikerjakan dan dilaksanakan menimbulkan dampak pada hal lain, seperti Sumber Data Anak. Data Anak merupakan suatu hal yang penting karena ini sebagai pintu utama untuk melihat permasalahan dan apa yang menjadi kebutuhan yang mendasar anak. Data ini sifatnya bisa kualitatif maupun kuantitatif. Permasalahan yang ada dan kebutuhan dasar apa yang dibutuhkan oleh anak ini menjadikan tumpuan atau patokan penyusunan program yang akan difokuskan dalam Rencana Aksi Daerah (RAD) Kota Surakarta.

Base line data ini belum dibuat oleh Dinas PPPAPM Kota Surakarta bersama dengan OPD lain. Seharusnya masing-masing OPD mempunyai data anak dimasing-masing bagian. Data anak sudah ada di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan itupun hanya data anak yang dasar saja tidak ada yang spesifik. Perbedaan definisi anak yang ada didalam Undang-Undang baik Ketenagakerjaan Anak, Perlindungan Anak, UU Pemilu yang membuat masing-masing OPD harus memiliki data dasar yang disesuaikan. Sehingga ini pentingnya untuk diskusi bersama dan duduk bersama untuk menyamakan persepsi mengenai anak dan permasalahan-permasalahannya

## **D. Penutup**

### **a. Kesimpulan**

Keberhasilan suatu program yang ada di masyarakat pasti didukung oleh tingginya partisipasi masyarakat, partisipasi masyarakat menjadi hak yang sangat penting untuk mengetahui apa yang dibutuhkan mereka untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tingginya partisipasi masyarakat tersebut dikarenakan tingginya ruang partisipasi untuk mengeluarkan ide-ide ataupun solusi atau kondisi yang ada dimasyarakat yang sesuai dengan kebutuhan. Keterlibatan masyarakat dapat berbentuk pemberdayaan keluarga/masyarakat sekitar, program bersama, penyediaan layanan tubuh kembang dan perlindungan anak, dan peyediaan dana.

Antusias masyarakat Kota Surakarta untuk berpartisipasi sangat besar, semua masyarakat memiliki kesadaran sendiri untuk ikut mendukung program pemerintah yang terkait dengan pemenuhan hak anak. Hampir semua masyarakat yang ada di Surakarta mendukung adanya kebijakan Kota Layak Anak. Masyarakat Kota Surakarta berpartisipasi dalam kebijakan Kota Layak Anak dan sukses mengantarkan Kota Surakarta untuk mendapatkan penghargaan tertinggi, partisipasi masyarakat Kota 159 Surakarta sudah tinggi dan bekerjasama dalam mensukseskan kebijakan yang layak anak dan ramah anak. Keberhasilan



kebijakan KLA tidak hanya didukung oleh masyarakatnya juga akan tetapi didukung oleh aktor baik dari tokoh masyarakat maupun penggerak lainnya. Penggerak tersebut dapat dari sektor formal maupun nonformal.

Aktor kebijakan nonformal adalah orang-orang yang memiliki kepentingan, partisipasi masyarakat dalam mewujudkan kebijakan Kota Layak Anak di Kota Surakarta bisa dilihat dan dibedakan dari partisipasi LSM yang masuk dalam Gugus Tugas KLA Kota Surakarta, Forum Anak Surakarta, dan keterlibatan dunia usaha dalam mewujudkan KLA. Lembaga Swadaya Masyarakat dirangkul oleh pemerintah Kota Surakarta dan masuk dalam Tim Gugus Tugas KLA Kota Surakarta, LSM dari awal terlibat dalam persiapan, perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi. Selalu mengawal dan mengawasi setiap ada kegiatan dan melakukan pendampingan kepada anak-anak yang membutuhkan bantuan hukum maupun perlindungan. Partisipasi Anak juga disediakan ruang, ini merupakan salah satu memfasilitasi hak sipil dan kebebasan anak yang sudah ada didalam Konvensi Hak Anak. Partisipasi Anak seluruh Kota Surakarta diwakili oleh Forum Anak Surakarta. FAS juga dilibatkan dalam musrenbang, ini menjadi bukti bahwa pemerintah Kota Surakarta bahwa anak bukan hanya menjadi pelengkap akan tetapi diperhatikan untuk meningkatkan kesejahteraan anak. Forum Anak juga terlibat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Kota Surakarta 160 memiliki Forum Anak dari tingkat kelurahan, kecamatan, sampai dengan kota. Dari sisi dunia usaha pemerintah Kota Surakarta bekerjasama dengan berbagai mitra usaha yang jumlahnya lebih dari 50 perusahaan, baik dari mitra busana, boga/kuliner, pendidikan, wisata, olahraga, dan kesehatan.

Pendapat yang disampaikan oleh Oakley (1991:9) yang berkaitan dengan partisipasi. Pengertian pokok partisipasi ada tiga dimensi, yaitu partisipasi sebagai kontribusi; partisipasi sebagai organisasi; dan partisipasi sebagai pemberdayaan. Partisipasi masyarakat Kota Surakarta ini adalah bagian dari partisipasi LSM yaitu Yayasan KAKAK, Forum Anak Surakarta, dan partisipasi dunia usaha. Partisipasi masyarakat dijelaskan menjadi indikator-indikator sebagai berikut : (a) Kontribusi Pemikiran, berupa gagasan yang di salurkan oleh Forum Anak dari aspirasi anak-anak ataupun masukan dari Lembaga masyarakat yang melindungi hak-hak anak. (b) Kontribusi Dana yang diberikan oleh pihak yang bekerjasama yaitu dunia usaha. (c) Kontribusi Tenaga, keterlibatan dalam partisipasi dari PTPAS, Yayasan Kakak, Forum Anak Surakarta dan yang tergabung dalam tim gugus tugas KLA dalam melakukan kegiatan yang mendukung pelaksanaan kegiatan untuk memenuhi hak anak seperti melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan usaha-usaha untuk mencapai

tujuan KLA. (d) Kontribusi Sarana yang disediakan oleh pemerintah dan masyarakat sekitar. Tantangan yang dihadapi dalam melakukan kebijakan Kota Layak Anak adalah egosektoral yang masih tinggi antar OPD dalam KLA dan belum ada sistem informasi data anak Kota Surakarta.

**b. Saran**

Untuk menghindarkan OPD yang menjadi Tim dalam Gugus Tugas KLA Kota Surakarta dari yang namanya “egosektoral” maka perlu adanya komunikasi dan sering melakukan koordinasi dengan OPD yang masuk dalam Gugus Tugas KLA untuk selalu ditingkatkan agar dapat mengurangi hal-hal tersebut, karena dengan adanya egosektoral antar OPD KLA sangat merugikan karena masalah anak ini sangat banyak dan rumit sehingga membutuhkan banyak pihak untuk menyelesaikannya. Komunikasi dan koordinasi yang baik diharapkan dapat membangun KLA bersama-sama sehingga tidak ada lagi OPD yang memberikan tanggung jawabnya dan melemparkan kepada OPD lain.

Untuk melengkapi kekurangan informasi data anak yang dibutuhkan untuk mengetahui kendala apa saja dan memetakan apa saja yang menjadi hak anak di Kota Surakarta perlu dilakukan langkah untuk membuat Web yang berisikan data-data anak yang terintegrasi dengan masing-masing OPD sehingga data yang didapat benarbenar valid satu sama lain.

**DAFTAR PUSTAKA :**

- Agus Joko Witiarso, dkk. 2014. *Modul Integrasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Bagi Penguatan Kapasitas dan Kelembagaan Forum Anak di Kota Surakarta*. Surakarta : Bappeda Kota Surakarta.
- Arif Saiful, *Partisipasi, Demokrasi, dan Pembangunan*, Malang: Averro Press
- Arikunto, Suharsimi. 2002. *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta : PT Rineka Cipta. Hlm. 136
- B. Hestu Cipto Handoyo, 2008. *Prinsip-prinsip Legal Drafting dan Desain Naskah Akademik*, Yogyakarta: Penerbit Universitas Atma Jaya Yogyakarta
- Dwiningrum, Siti Irene Astuti. 2011. *Desentralisasi Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pendidikan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Edi Suharto. 2008. *Kebijakan Sosial sebagai Kebijakan Publik*. Bandung : Alfabeta, hal 23

- Herlina, Apong dan kawan kawan. 2003. *Perlindungan Anak : Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*. Jakarta : Unicef
- Hetifah Sj Sumarto. 2004. *Inovasi, Partisipasi dan Good Governance: 20 Prakarsa Inovatif dan Partisipatif di Indonesia*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia
- Holil Soelaiman. 1980. *Partisipasi sosial dalam usaha kesejahteraan sosial*, Bandung: Andi Offset
- Joko Subagyo.P,2006.*Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*. Jakarta: PT Rineka Cipta
- Lexy J. Moleong,2011. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset
- Maulana Hassan Wadong, 2007. *Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*. Jakarta : PT. Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Moch Faisal Salam. 2005. *Hukum Acara Peradilan Anak di Indonesia*. Bandung: Mandar Maju
- Nawawi, Ismail. 2009. *Public Policy Analisis, Strategi Advokasi Teori dan Praktek*. Surabaya: PMN
- Sarwono, Jonathan. 2006. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Yogyakarta : Graha Ilmu
- Solekhan. 2014. *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Berbasis Partisipasi Masyarakat*. Malang : Setara Press (Kelompok Penerbit Intrans)
- Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.Hlm.309
- Supeno, Eko. 2005. *Partisipasi Masyarakat dalam Proses Pembangunan dan Upaya Mewujudkannya*. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga, Vol 18, No 2 hal 1-5
- Taufieq Uwaidha, dkk. 2013. *Modul Fasilitasi Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak Propinsi Jawa Tengah*. Semarang : Badan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan KB Propinsi Jateng. Hal 19
- Totok S, Poerwoko. 2013. *Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Kebijakan Publik*. Bandung : Alfabeta
- William N. Dunn (1994), *Public Policy Analysis : An Introduction*, Prentice-Hall International, Engglewood Cliff, New Jersey, Chapter 1-3

**Perundang-undangan :**

Undang-Undang Republik Indonesia no 23 tahun 2002, tentang “Perlindungan Anak”, Bab I, pasal 1 ayat 2

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

UNICEF. 1989. Convention on the Rights of the Child. New York City: UNICEF

Kementrian Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia 2007

Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak.

Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak

Peraturan Meneg PPPA No. 13 Tahun 2011 tentang Panduan Pengembangan KLA Lebih lanjut, keterlibatan masyarakat menjadi salah satu indikator dalam pengembangan kebijakan KLA, sebagaimana bisa dilihat dalam Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Meneg PPPA) No. 12 tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak.

**Situs Web Organisasi :**

[http://yayasankakak.org/?page\\_id=64](http://yayasankakak.org/?page_id=64)

<http://surakarta.go.id/>

<http://www.kotalayakanak.org/>

**Sumber Internet :**

Immarotul Mufidah Dan Maya Mustika Kartika Sari, *Partisipasi Masyarakat Jambangan RW 03 Dalam Mewujudkan Surabaya Kota Layak Anak Melalui Program Inisiasi Kampung'e Arek Suroboyo (ikas)*, Pada Situs <http://jurnalmahasiswa.unesa.ac.id/index.php/jurnal-pendidikan-kewarganegaraa/article/view/19244>, Diakses Pada 30 Mei 2018.

Anindya Rachmania, Dkk, *Implementasi Program Kota Layak Anak Dengan Pendekatan Kelurahan Layak Anak Di Kecamatan Gayamsari* Pada Situs <http://id.portalgaruda.org/?ref=browser&mod=viewarticle&article=32716> Diakses Pada 5 Juni 2018

<https://keluarga.com/5025/8-kota-ramah-anak-di-indonesia-sudahkah-anda-menetap-di-salah-satunya> Diakses Pada Hari Sabtu, Tanggal 21 September 2017, Pukul 20:41 WIB.

Rahmat A. Prakoso, *Partisipasi Publik dalam Proses Kebijakan di Masa Transisi*, dalam [http://www.ipcos.or.id/index2.php?option=com\\_pdf=1&ID=42](http://www.ipcos.or.id/index2.php?option=com_pdf=1&ID=42). Diakses pada Tanggal 18 Oktober 2018

Muhammad Izzul Haq, *Quo Vadis Partisipasi masyarakat dalam kebijakan Kabupaten Layak Anak (KLA) Sleman*, [http://digilib.uin-suka.ac.id/19579/1/11250056\\_BAB-I\\_IV-atau-V\\_DAFTAR-PUSTAKA.pdf](http://digilib.uin-suka.ac.id/19579/1/11250056_BAB-I_IV-atau-V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf)

<http://www.solopos.com/2010/03/18/jumlah-anak-jalanan-di-solo-diduga-meningkat-16757> , diakses pada Hari Minggu Tanggal 18 Maret 2018, Pukul 20.00

Yayasan Kesejahteraan Anak Indonesia, “Laporan Indonesia Pelaksanaan Konvensi Hak Anak”,[http://www.ykai.net/index.php?option=com\\_content&view=article&i=963:laporan-indonesia-pelaksanaan-konvensi-hak-anak&catid=117:terkini&Itemid=136](http://www.ykai.net/index.php?option=com_content&view=article&i=963:laporan-indonesia-pelaksanaan-konvensi-hak-anak&catid=117:terkini&Itemid=136), diakses pada Hari Minggu Tanggal 18 Maret 2018, Pukul 20.35

<http://www.kemenpppa.go.id/lib/uploads/list/8d214-renstra-kpppa-2015-2019.pdf> Diakses Pada Hari Sabtu, Tanggal 21 September 2017, Pukul 21:05 WIB.

<http://news.metrotvnews.com/read/2015/08/11/420076/tiga-provinsi-raih-penghargaan-kota-layak-anak>. Diakses Pada Hari Minggu, Tanggal 22 September 2017, Pukul 16:15 WIB.

Mufid Aryono, Ahmad. 2009. 5 Kelurahan jadi Percontohan Layak Anak.Solopos. Diakses dari website <http://www.solopos.com/2009/10/13/5-kelurahan-jadi-percontohan-layak-anak-6193> Pada Hari Rabu, Tanggal 25 September 2017, Pukul 10:00 WIB

<http://www.kla.id/kota-layak-anak/> ,Pada Hari Rabu, Tanggal 19 Maret 2018, Pukul 19:00 WIB

<https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/92/1234/k-l-a-kabupaten-kota-layak-anak> Diakses Pada Hari Minggu, Tanggal 22 September 2017, Pukul 20:15 WIB

[https://id.wikipedia.org/wiki/Kota\\_Surakarta#Kota\\_Surakarta](https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Surakarta#Kota_Surakarta) diakses pada tanggal 2 Oktober 2018

[http://surakarta.go.id/?page\\_id=3132](http://surakarta.go.id/?page_id=3132) diakses pada tanggal 2 Oktober 2018

<https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/92/1234/k-l-a-kabupaten-kota-layak-anak> Diakses Pada Hari Minggu, Tanggal 22 September 2017, Pukul 20:15 WIB

<http://wartakota.tribunnews.com/2018/02/04/peran-dunia-usaha-wujudkan-indonesia-layak-anak> diakses pada tanggal 20 April 2019

<http://tarulh.com/wp-content/uploads/2018/01/Desain-Besar-Kota-Layak-Anak.pdf>, Grand Design Jakarta menuju Kota Layak Anak 2018-2020 diakses pada tanggal 3 April 2019

[http://jdih.surakarta.go.id/jdihsolo/proses/produkhukum/file/4970PERWALI\\_NO\\_17\\_TAHUN\\_2010.pdf](http://jdih.surakarta.go.id/jdihsolo/proses/produkhukum/file/4970PERWALI_NO_17_TAHUN_2010.pdf), Peraturan Walikota Surakarta tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengembangan Kelurahan Layak Anak Kota Surakarta. Diakses pada tanggal 15 Maret 2019

<https://media.neliti.com/media/publications/229091-kabupaten-kota-layak-anak-6606fe4b.pdf>, Kabupaten Kota Layak Anak oleh Hamid Patilima Universitas Indonesia. Diakses pada tanggal 20 Mei 2019

<https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jpgs/article/view/15858>, Penyelenggaraan Kota Layak Anak di Kota Depok Tahun 2015

<https://id.scribd.com/document/349785111/1-Upaya-Mewujudkan-Kota-Layak-Anak-Di-Surakarta-Dan-Makassar> , Upaya Mewujudkan Kota Layak Anak Di Surakarta dan Makassar, Moh Ilham A Hamudy. Diakses pada tanggal 15 April 2019